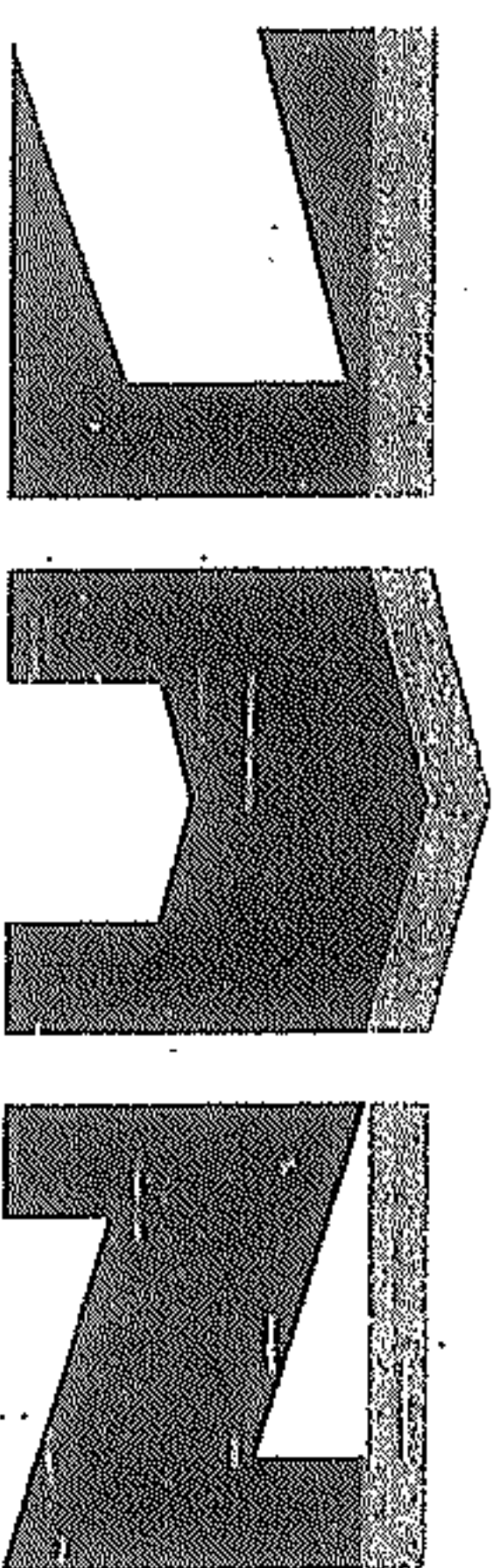


JURNAL Administrasi Negara



Peranan Komunikasi Administrasi Dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Bank Sumsel
(Studi Penelitian Pada Unit Kredit PT Bank Sumsel Cabang Kapten A Rivai Palembang)
Ermanovida

Analisis Teori Human Capital dan Teori Screening Hypothesis
(Kajian Tentang Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik)
Lili Erlina

Peran Pendidikan Dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial
Siamet Widodo

Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Palembang Sebelum dan Sesudah Bertakunya
Otonomi Daerah Secara Luas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Kings Muhammad Sobri

Analisis Lingkungan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan
Martina

Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik
(Studi Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1980
Ranasa Putra

Tuntutan dan Pertimbangan Dalam Penggunaan Pinjaman Oleh Pemerintah Daerah dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kiyas Muhammad Sobri



DITERBITKAN OLEH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRWIJAYA

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Berkala terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Administrasi Negara.

Ketua Dewan Penyunting

Gatot Budiarto

Wakil Ketua Dewan Penyunting

A. Fikry Rachman

Penyunting Ahli

Hasan Rachmany (Direktorat Jenderal Pajak)

Musywardi Chalid (Universitas Padjadjaran)

Argyo Demartoto (Universitas Diponegoro)

M. Budiyo (Universitas Bengkulu)

A. W. Widjaja (Universitas Sriwijaya)

H. Slamet Widodo (Universitas Sriwijaya)

Ardyan Saptawan (Universitas Sriwijaya)

Azhar (Universitas Sriwijaya)

M. Syahrudin (Universitas Jambi)

Swisantoro (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

A. Rizali

Lili Erina

Ermanovida

Nurnah Semil

Katrina Inania

M. Nurbudianto

Raniasa Putra

Pelaksana Tata Usaha

Diana Sari

Amiruddin

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Jln. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir 30662. Telp. (0711) 580 580572. Fax (0711) 580572.

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya. Pembina: H. Slamet-Widodo (Dekan), Pengarah: Gatot Budiarto (Pembantu Dekan I), Lili Erina (Ketua Jurusan Administrasi Negara), Raniasa Putra (Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara).

DAFTAR ISI

Jurnal Administrasi Negara

Volume 1 Nomor 2, Mei 2006

ISSN 1412-5811

Halaman

Peranan Komunikasi Administrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
PT. Bank Sumsel (Studi Penelitian Pada Unit Kredit PT. Bank Sumsel Kapten
A. Rivali Palembang)
ERMANOVIDA

1

Analisis teori Human Capital dan Teori Screening Hypothesis
(Kajian Tejang Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik)
LILIERINA

6

Peran Pendidikan Dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial
SLAMET WIDODO

15

Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Palembang Sebelum dan Sesudah
Berlakunya Otonomi Daerah Secara Luas Berdasarkan Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999
KIAGUS MUHAMMAD SOBRI

24

Analisis Lingkungan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika
Perubahan.
MARTINA

35

Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik (Studi tentang Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia NO. 30 tahun 1980)
RANIASA PUTRA

47

Tutupan dan Pertimbangan dalam Penggunaan Pinjaman Luar Negeri Oleh
Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
KIAGUS MUHAMMAD SOBRI

54

ANALISIS TEORI HUMAN CAPITAL

DAN

TEORI SCREENING HYPOTHESIS
 (Kajian Tentang Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik)

Oleh: Lili Erina*

ABSTRAK

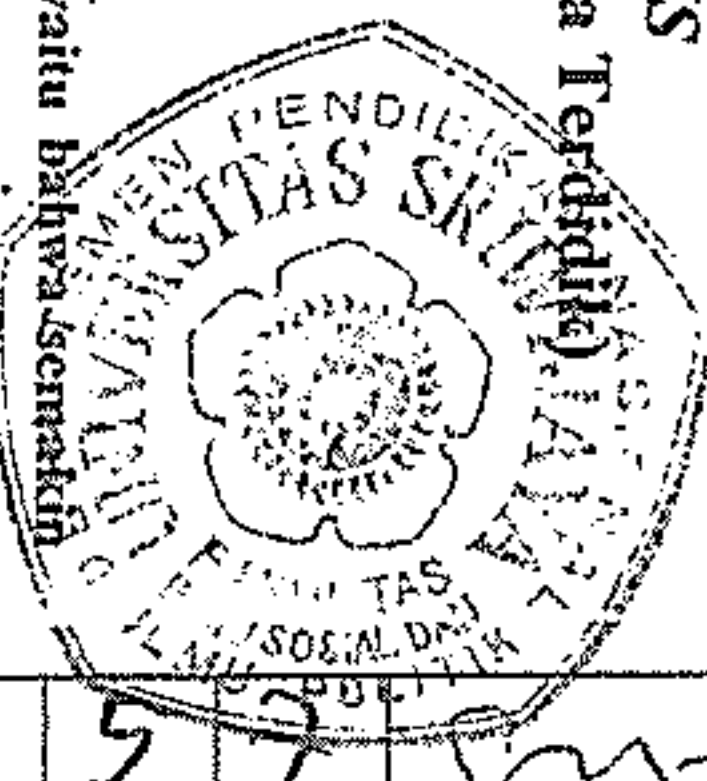
Ada dua kecenderungan yang muncul akhir-akhir ini, yaitu bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja semakin besar proporsi penganggur terdidik, dan semakin lama mengalami masa tunggu. Berdasarkan kecenderungan tersebut, beberapa pihak mungkin akan menafsirkan bahwa perluasan sistem pendidikan cenderung memberikan andil yang menentukan terhadap timbulnya masalah pengangguran tenaga kerja terdidik. Penafsiran ini tampak benar secara empiris, tetapi cukup berbahaya jika digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena pengangguran bukan semata-mata merupakan gejala persejajaran (supply phenomena) tetapi lebih tepat dikatakan sebagai gejala permintaan (demand phenomena). Pengangguran terjadi karena laju investasi pada lapangan kerja produktif dan remuneraif relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah tenaga kerja terdidik yang sangat progresif.

Kata Kunci : Human Capital, Screening, Hypothesis, Progresif, Regulated, Remuneratif.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 Dewasa ini banyak lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik daripada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja bukannya tanpa dasar : data sensus penduduk tahun 2000 memperlihatkan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan

proporsi penganggur dari lulusan pendidikan yang lebih rendah. Namun demikian, kritik tersebut juga belum benar seluruhnya karena cara berfikir yang digunakan dalam menafsirkan data empiris tersebut cenderung agak menyederhanakan. Cara berfikir tersebut seolah-olah hanya memperhatikan pendidikan sebagai satu-satunya variabel yang menjelaskan masalah pengangguran. Cara berfikir ini cukup berbahaya; bukan hanya akan berakibat penyudutan yang tidak perlu terhadap sistem pendidikan, tetapi juga cenderung akan menjadikan pengangguran sebagai



Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tulisan	Nomor urut Publikasi dan Fakultas
0	0	1	0	0	0	5

masalah yang selamanya tidak dapat dipecahkan.

Kadaan tersebut diatas memerlukan penjelasan yang lebih konseptual terhadap masalah pengangguran tenaga terdidik, yang dewasa ini banyak disoroti oleh masyarakat. Penjelasan secara lebih konseptual diharapkan mampu mendudukkan persoalan pada proporsi yang sebenarnya, khususnya tentang fungsi dan kedudukan sistem pendidikan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

2. Pertanyaan Permasalahan

Peran pendidikan didalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), memang tidak perlu diragukan. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah pengembangan sumber daya manusia tersebut selalu harus dilakukan melalui pendidikan formal ?
 Pertanyaan yang lebih khusus ialah program pendidikan formal yang bagaimana yang mampu mengembangkan SDM agar menjadi modal dasar pembangunan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi?
 Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat relevan dengan isu kebijakan pendidikan yang sedang disoroti saat ini.

3. Tujuan

Tulisan ini bermaksud mengamati kaitan antara kesempatan pendidikan yang lebih luas dengan timbulnya masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui tulisan ini, akan diberikan tafsiran yang berbeda dengan tafsiran yang selama ini dilakukan sebagai pilak, terhadap masalah kaitan antara pendidikan dengan

gejala pengangguran di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan dalam menangani masalah ketidak sesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja memiliki landasan konseptual dan dampak yang berarti terhadap upaya memperkecil pengangguran tenaga terdidik.

4. Kerangka Berfikir

Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Pengertian ini diyakini oleh suatu teori yang menamakan dirinya Teori Human Capital. Teori Human Capital menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang karenanya. Teori Human Capital ini menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

Namun demikian, sering dijumpai kenyataan empiris bahwa asumsi-asumsi yang digunakan oleh Teori Human Capital tidak selalu benar dalam kenyataannya. Misalnya, studi-studi yang dilakukan oleh Blau dan Duncan (1967) di

Amerika Serikat, Mark Blaug (1974) di Inggris. Schiefel & Farrel (1982) di Chile, dan Cummings (1980) di Indonesia, ternyata menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda antara negara maju dan negara berkembang: pendidikan formal hanya memberikan kontribusi lebih kecil terhadap status pekerjaan dan penghasilan lulusan pendidikan formal dibandingkan dengan latar belakang keluarga dan faktor-faktor luar sekolah lainnya.

Sebagian dari studi-studi pendidikan dan tenaga kerja tersebut diatas melakukan pengukuran produktivitas tenaga kerja melalui pengukuran tingkat penghasilan atau "earning power" pekerja. Gaji atau penghasilan memang bukan merupakan cara pengukuran yang salah sebagai indikator produktivitas kerja, karena penghasilan ialah suatu bentuk balas jasa untuk seseorang yang telah menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi suatu sistem ekonomi khususnya dalam suatu mekanisme pasar yang berjalan sempurna. Namun penentuan standar gaji pada suatu sistem politik ekonomi tertentu kadang-kadang menyesatkan jika digunakan sebagai ukuran produktivitas pekerja karena faktor-faktor lain selain kemampuan dan keahlian juga memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap pendapatan seseorang.

Keragu-raguan yang sering terlontar dari kalangan para peneliti terhadap asumsi teori *Human Capital* tersebut memang cukup beralasan. Pertama, lapangan kerja, khususnya sektor modern yang bersifat remuneratif, sangat terbatas jumlahnya, sehingga tenaga kerja terdidik yang berjumlah besar dan muncul dalam waktu yang

bersamaan sering tidak dapat diampung oleh lapangan kerja yang tersedia di sektor tersebut. Kedua, kenyataan umum menunjukkan bahwa lulusan pendidikan belum siap untuk bekerja sesuai lapangan kerja, sehingga banyak dunia usaha industri masih harus melatih tenaga tersebut dalam waktu yang relatif lama agar mereka dapat bekerja. Ketiga, asumsi bahwa pendidikan formal mampu menyediakan tenaga kerja terampil dan mampu bekerja mungkin tidak benar.

Atas dasar keragu-raguan tersebut, muncul teori lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan asumsi teori *Human capital*, yaitu "Teori *Kredensialisme*" dan "Screening Hypothesis". Kedua teori tersebut tidak yakin bahwa fungsi pendidikan formal mampu atau perlu menghasilkan tenaga terampil bekerja. Akan tetapi, teori-teori tersebut merasa yakin perolehan kemampuan dan keterampilan bekerja dapat diperoleh diluar pendidikan formal, misalnya melalui pelatihan kerja, pengalaman kerja, dan belajar sendiri.

Teori *Human Capital* mengungkapkan bahwa struktur masyarakat lebih ampuh daripada individu didalam mendorong suatu pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan formal sering hanya dianggap sebagai alat untuk mempertahankan statusquo daripada memegang status sosial yang lebih tinggi. Pemilikan ijazah pendidikan sering dianggap merupakan hasil pendidikan yang lebih penting daripada kemampuan dan keahlian. Dengan demikian, pendidikan menjadi sesuatu yang apriori, khususnya dalam menduduki suatu status jabatan atau pekerjaan.

Teori "Screening Hypothesis" berpandangan bahwa pendidikan sering dianggap semata-mata sebagai suatu alat saringan (*filtering device*) untuk menyeleksi kelompok orang yang sebenarnya sudah diuntungkan sejak lahir. Sementara itu menghambat kelompok orang tertentu yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan ... formal. Menurut teori ini, perolehan pendidikan formal sering dianggap sebagai lambang status sosial dari suatu kelompok orang. Menurut teori ini, studi-studi yang mengukur "penghasilan" sebagai *proxy* dari produktivitas seseorang tidaklah tepat. Jika dikaji dari teori ini nampak jelas bahwa tingkatan gaji seseorang sering hanya ditentukan oleh ijazah pendidikan yang dimiliki sebagai suatu modal kultur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penafsiran yang berbeda perlu dilakukan terhadap masalah pengangguran tenaga kerja terdidik. Masalah ini merupakan : suatu petunjuk dari adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan lapangan kerja. Masalah ketidaksesuaian ini tidak selamanya merupakan akibat dari sistem pendidikan, tetapi dapat diterangkan oleh dua tafsiran yang berbeda. Masalah pengangguran tenaga kerja terdidik dapat dianggap sebagai "gejala persediaan" (*supply phenomena*); ketidaksesuaian antara pendidikan dengan lapangan kerja merupakan gejala ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang mudah dilatih atau yang dapat membejajarkan diri agar menjadi tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah dan semakin beraneka ragam. Atau

mungkin juga merupakan "gejala permintaan" (*demand phenomena*); yaitu bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sistem pendidikan itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh lapangan kerja yang belum memfungsikan sistem pelatihan kerja secara optimal.

Jika ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dianggap sebagai "demand phenomena", maka sistem pelatihan kerja juga harus merupakan bagian yang integral didalam industri atau perusahaan yang memiliki fungsi menghasilkan tenaga kerja siap pakai (*ready trained*). Sementara itu sistem pendidikan formal secara maksimal harus mampu menghasilkan tenaga yang memiliki kecakapan dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut di dunia kerja.

B. ANALISIS

Ada dua kecenderungan yang muncul akhir-akhir ini, yaitu bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja semakin besar proporsi penganggur terdidik, dan semakin lama mengalami masa tunggu. Berdasarkan kecenderungan tersebut, beberapa pihak mungkin akan menafsirkan bahwa perluasan sistem pendidikan cenderung memberikan andil yang menentukan terhadap timbulnya masalah pengangguran tenaga kerja terdidik. Penafsiran ini tampak benar secara empiris, tetapi cukup berbahaya jika digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena pengangguran bukan semata-mata merupakan gejala persediaan (*supply phenomena*) tetapi lebih tepat dikatakan sebagai gejala permintaan (*demand phenomena*).

Pengangguran terjadi karena laju investasi pada lapangan kerja produktif dan remunerasi relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah tenaga kerja terdidik yang sangat progresif.

Berdasarkan informasi yang dianalisis dalam tulisan ini, kaitan antara perluasan pendidikan dengan gejala pengangguran tenaga kerja terdidik dapat dikaji secara konseptual dan empiris, paling tidak dari tiga sudut pandang. Terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik diakibatkan paling tidak oleh tiga alasan penting, yaitu : (1) ketimpangan struktural antara persediaan dan kesempatan kerja; (2) program pendidikan profesional/kejuruan yang terlalu bersifat "regulated"; dan (3) penguatan persepsi kredisialisme pendidikan.

1. Gejala Ketimpangan Struktural

Pengangguran tenaga terdidik yang terjadi seperti tersebut diatas disebut pengangguran gejala struktural. Gejala ini yang terjadi sebagai akibat dari ketimpangan antara struktur kesempatan kerja dan struktur angkatan kerja menurut pendidikan. Sementara sistem pendidikan sudah menghasilkan sejumlah besar lulusan yang berpendidikan lebih tinggi, struktur ekonomi masih didominasi oleh kegiatan ekonomi tradisional dan/atau subsistensi yang masih membutuhkan lebih banyak tenaga kerja berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Dengan demikian, maka lapangan kerja yang tersedia masih lebih banyak didominasi oleh lapangan kerja sektor informal, sehingga masih banyak lulusan pendidikan tinggi yang terpaksa

mengisi lapangan kerja sektor informal ini.

Tentu saja, banyaknya tenaga kerja berpendidikan tinggi yang bekerja pada "Sektor Informal" bukanlah hal yang sepenuhnya negatif. Masalahnya ialah bahwa kegiatan ekonomi informal ini umumnya memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah, sehingga tidak menghasilkan "return" yang memadai karena keuntungan yang diperoleh, tidak sebanding dengan biaya yang harus dianggung selama menempuh pendidikan tinggi. Tantangannya ialah bukan meniadakan para pekerja ke sektor formal, tetapi melakukan pembinaan terhadap sektor informal ini agar menjadi sektor yang lebih produktif, efisien, dan remuneratif dengan dukungan modal yang memadai.

Dominasi kegiatan ekonomi informal baik pada sektor pertanian maupun sektor industri pengolahan tersebut diatas, merupakan tantangan bagi kebijaksanaan nasional pengembangan sumber daya manusia, melalui pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Namun demikian, pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada pengembangan kegiatan ekonomi informalpun masih merupakan tantangan yang cukup penting, khususnya dalam rangka merubah struktur ekonomi kearah dominasi sektor-sektor remuneratif.

Orientasi program pendidikan dan pelatihan tersebut sangat diperlukan, mengingat sebagian besar pekerja Indonesia masih berada pada sektor informal dengan produktivitas yang masih sangat rendah. Contoh lapangan

usaha pertanian (sektor tradisional) dan industri pedesaan (pengrajin) yang diperankan oleh angkatan kerja berpendidikan rendah ini, memiliki sifat yang tidak berbeda dengan sektor-sektor informal lainnya baik dipandang dari penggunaan teknologinya, efisiensinya, maupun tingkat produktivitasnya. Sektor tersebut lebih tepat dipandang sebagai sektor pertanian pedesaan yang bersifat "subsisten" dan yang belum tersentuh oleh intervensi modal.

2. Gejala Pendidikan Profesional yang "Regulated"

Gejala ini dapat ditunjukkan dengan masih besarnya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan jenjang pendidikan kejuruan tingkat menengah dan pendidikan profesional jenjang pendidikan tinggi, sementara peranan lembaga pendidikan swasta dan dunia usaha masih terlalu kecil. Program-program pendidikan tinggi profesional (program So) lebih banyak yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi pemerintah daripada perguruan tinggi swasta. Dengan demikian maka sebagian besar lulusan pendidikan tinggi (sekitar 68 %) juga berasal dari program diploma pendidikan tinggi negeri.

Dominasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional ini merupakan petunjuk bahwa pendidikan profesional dan keahlian di Indonesia masih bersifat "regulated". Sistem pendidikan profesional yang "regulated" ini juga sekaligus menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan swasta

dan dunia usaha belum menunjukkan perannya.

Sistem pendidikan yang "regulated" ini cenderung menutup kemungkinan tumbuhnya pendidikan profesional yang diselenggarakan masyarakat. Hal ini juga akan cenderung mempengaruhi pertumbuhan penguatan pengaruh brokrasi dalam mengontrol atau mengakredit keahlian profesional yang tumbuh dengan pesat di luar kemampuan pemerintah untuk mengendalikannya. Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah perlu pemerintah mengatur pertumbuhan pendidikan profesi dan keahlian, sehingga menutup kemungkinan tumbuhnya dunia profesi dan keahlian. Contoh perkembangan pendidikan profesional (misalnya MBA, atau MM) pada lembaga pendidikan swasta tetap tumbuh semakin menamur, walaupun tidak diakui oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemberi akreditasi. Berdasarkan hal tersebut mungkin perlu dipikirkan suatu cara agar memungkinkan tumbuhnya dunia profesi dan keahlian dengan memperkecil pengaruh regulasi yang berlebihan. Berdasarkan penguatan kehangatan ini (regulated) maka diharapkan dunia profesi dan keahlian akan tumbuh subur di dunia kerja.

3. Penguatan Persepsi Kredisialisme Pendidikan

Tertalu kuatnya pengaruh teori "Human capital" terhadap cara berpikir masyarakat, menyebabkan tumbuhnya sikap yang seolah-olah "mengukuhkan" pendidikan sekolah sebagai lembaga yang mampu mempersiapkan tenaga secara

langsung dapat dikerjakan. Cara berfikir ini muncul dari aliran yang menamakan dirinya "credentialists" yang menganggap berbahaya jika kepada pendidikan sekolah diberikan status kredensialisme untuk bekerja. Bahaya tersebut akan menjadi semakin besar pada saat-saat terjadinya gejala peng-umum-an (*devokasionalization*) program-program pendidikan

Sementara pihak mungkin berpendapat bahwa gejala sistem pendidikan yang mengarah pada dominasi program pendidikan umum tersebut merupakan gejala ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja. Lapangan kerja yang dimaksud ialah sektor modern atau lebih dikenal dengan sektor produktif dan remunerasi karena sektor seperti ini lebih banyak membutuhkan tenaga terampil dan tenaga yang memiliki keahlian profesional.

Gejala "devokasionalized" pendidikan tingkat SLTA pada kenyataannya berjalan di luar kontrol pemerintah, walaupun selama kurun waktu Repelita IV, pemerintah sudah melakukan perluasan SLTA kejuruan dengan menambah jumlah murid sebanyak dua kali lipat. Gejala tersebut telah terjadi karena pertambahan jumlah SLTA. Namun berjalan lebih cepat lagi sehingga proporsi jumlah murid SLTA umum tetap lebih tinggi dan bahkan cenderung terus meningkat sampai dengan akhir dasawarsa 1980an. Oleh karena itu, maka jumlah SLTA umum akan cenderung dominan dan akan semakin dominan dikemudian hari. Gejala ini tampaknya akan terus terjadi karena sejak kurun waktu Repelita V. SLTA kejuruan cenderung tidak akan diperluas lagi.

Jika hal ini benar, maka dikemudian hari, fungsi pendidikan kejuruan dan keahlian sebagai pendidikan persiapan kerja secara langsung-angsur akan dimainkan oleh sistem pelatihan kerja dan pendidikan tinggi profesional. Sementara itu pendidikan tingkat SLTA akan beralih fungsi yang secara menyeluruh menjadi pendidikan *senesta (universal education)*.

Gejala "De-vokasional-ization" pendidikan tingkat SLTA boleh dikatakan wajar-wajar saja, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, yang lebih banyak memfungsikan sistem pelatihan kerja (*baik on the job training* maupun kursus-kursus keahlian) sebagai pendidikan kejuruan. Masalahnya ialah bahwa program pendidikan tinggi juga cenderung "devokasionalized" sehingga cenderung lebih banyak mempersiapkan tenaga akademis daripada tenaga yang berkeahlian profesional.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan uraian pertama dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun terakhir telah terjadi pergeseran struktur yang lebih baik (lebih seimbang) baik pada ekonomi maupun lapangan kerja. Namun demikian struktur lapangan kerja masih terlalu berat pada sektor pertanian (lebih 50 %), sehingga belum terjadi keseimbangan antar sektor yang lebih dinamis baik dilihat dari segi produktivitas, efisiensi, maupun kesejahteraan (pendapatan) tenaga kerjanya. Untuk melanjutkan usaha menggeser struktur lapangan kerja yang lebih seimbang, perlu terus diperkecil

kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional dan informal, seraya memperluas lapangan kerja formal yang lebih produktif. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperlambat laju penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional dan meningkatkan produktivitas dan efisiensinya.
 - b. Meningkatkan dan memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor lainnya terutama di sektor industri dan jasa dengan memperhatikan produktivitas dan efisiensinya.
 - c. Untuk dapat ditampung di sektor industri, terutama bagi angkatan kerja baru harus dibekali dengan keahlian dan kemampuan bekerja yang memadai. Upaya ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan.
2. Dalam perbandingan antar negara di kawasan Asia-Pasifik diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki laju investasi fisik yang cukup bersaing di negara-negara tersebut (sebesar 30 % yang hampir mendekati Jepang dengan laju inflasinya sekitar 3 %). Jika investasi ini diarahkan secara tepat, yaitu diarahkan pada pengembangan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap jumlah angkatan kerja terdidik yang lebih besar, maka diperkirakan bahwa Indonesia tidak mengalami masalah pengangguran tenaga terdidik yang cukup mengkhawatirkan. Di lain pihak dikemukakan suatu keadaan dimana persentase pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia cukup besar. Berdasarkan kedua informasi tersebut dapat dilihat masalah yang agak mendasar yaitu bahwa pola
 - a. Investasi lapangan kerja produktif di Indonesia masih terlalu diarahkan pada pertumbuhan dan belum diarahkan pada penyerapan tenaga kerja terdidik yang lebih besar jumlahnya.
 - b. Berdasarkan masalah yang terungkap tersebut diatas, maka pembinaan sektor-sektor tradisional pedesaan dan sektor informal perkotaan sangat diperlukan. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara cermat dan terencana, dengan intervensi modal, penggunaan teknologi tepat, dan penggunaan tenaga kerja terdidik. Melalui pembinaan ini diharapkan bahwa sektor-sektor tradisional dan informal tersebut akan menjadi sektor yang produktif dan sekaligus dapat menyerap tenaga kerja terdidik yang lebih besar jumlahnya.
 - b. Pola pembinaan yang sekarang dilakukan melalui, misalnya, konsepsi bapak angkat, program pencematan tenaga kerja sarjana di daerah pedesaan, program kejar usaha dan Program Magang, perlu terus dilanjutkan bahkan terus diintensifikan dengan tetap menggunakan strategi de-birokratisasi untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya cabang-cabang usaha dan industri baru.
 3. Walaupun laju investasi fisik di Indonesia cukup bersaing dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, laju investasi pengembangan sumber daya manusia ternyata cukup rendah. Laju investasi sumber daya manusia dapat dilihat dari persentase anggaran sektor pendidikan terhadap GDP yang ternyata paling rendah dibanding

- dengan negara-negara tersebut. Gejala makro ini menunjukkan bahwa percepatan investasi lapangan kerja produktif belum diimbangi dengan percepatan dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dilihat dari segi mutu tenaga kerja keluaran pendidikan. Hal ini membawa akibat yang ... lebih jauh terhadap pendayagunaan tenaga asing yang sebenarnya tidak perlu jika kualitas keluaran pendidikan kita sudah memadai. Dan masalah yang terungkap, saran-saran berikut ini bisa dipertimbangkan :
- a. Kajian menyeluruh terhadap sistem pendidikan tampaknya masih harus terus dilakukan, khususnya bagian sistem yang menyangkut pendidikan sebagai persiapan kerja, seperti program-program pendidikan pada : sekolah kejuruan, pendidikan tinggi akademis, pendidikan tinggi profesional, dan pendidikan luar sekolah.
- b. Perlu diciptakan keluwesan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan keahlian, kejuruan, dan profesi agar program-program tersebut berkembang dan bersaing secara leluasa mengikuti kebutuhan pasar.
- c. Perlu diciptakan suatu mekanisme dimana dunia usaha memiliki peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan profesi (program pendidikan kejuruan, keahlian dan profesional). Dunia usaha sebaiknya diberikan kesempatan untuk intervensi terhadap perubahan isi kurikulum, pengujian dan akreditasi untuk bekerja bagi lulusannya. Hal ini sekaligus untuk menekankan bahwa penilaian ijazah pendidikan umum (dasar dan menengah) tidak memiliki status kredensial untuk bekerja

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi. 1974. Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Seminar Perkembangan Ekonomi dan Kualitas Pendidik, oleh ISEILDUI.
- Blau, Peter M, and Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. The Free Press - Mac Millan Publishing Company Inc.
- Kelompok PSDM. 1992. Prospek Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Repelita VI. Jakarta, Biro Perencanaan Depdikbud.
- Schieffelin, Ernesto, Joseph Ferrat. 1982. Eight Years of Their Life Through Schooling to The Labor Market in Chile. Ottawa, Canada. IDRC

PERAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENGATASI KONFLIK SOSIAL

Oleh : Slamet Widodo*

Abstrak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Bila keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No.20 Tahun 2003). Sejalan dengan tujuan tersebut pendidikan mempunyai posisi struktural dalam pembangunan. Untuk itu pendidikan juga sangat berperan strategis dalam upaya mengatasi konflik sosial.

Kata kunci : Pendidikan

A. Latar Belakang

Berbicara masalah pendidikan bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang kompleks dinamis dan kontekstual, pendidikan merupakan wahana untuk pembentukan diri seseorang secara keseluruhan. Peran pendidikan dalam pembentukan diri sebagai sumber daya manusia, sebagai tujuan umum pendidikan yang meliputi aspek kognitif berupa keterampilan akademik dan bertfikir lebih tinggi (kemampuan memecahkan masalah). Selain itu pendidikan dalam prosesnya juga mencakup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, inisiatif, empati, dan memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal hidup dimasyarakat.

Sejak digulirkannya reformasi 1997 dan semanjak lengsernya kekuasaan soeharto membawa dampak pada tatanan masyarakat yang kurang kondusif dimana gejala-gejala sosial bermunculan. Hal ini ditandai dengan munculnya demonstrasi-demonstrasi

*Dosen Fisip Unsrj